

**ISU-ISU AKTUAL
DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Adanya potensi penetapan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam RKP Tahun 2020 mengalami tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun jadwal dan tahapan penetapan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penegasan tahapan dan jadwal guna efektifitas penyusunan dan pembahasan APBD TA 2020 yang disesuaikan dengan DPRD periode 2014-2019 dan DPRD periode 2019-2024.
3. Penegasan penganggaran untuk Dana Penyesuaian (DID).
4. Penegasan kriteria Lain-Lain Pendapatan Daerah yang bersumber dari hibah dan sumbangan pihak ketiga.
5. Penegasan beberapa kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, antara lain:
 - a. penyelenggaraan *Universal Health Coverage* yang wajib diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. Batas minimum dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota;
 - c. Penganggaran iuran bagi bayi lahir dibayar oleh peserta.
6. Penegasan mekanisme dan tahapan penganggaran TPP PNSD.
7. Penegasan mekanisme dan tahapan penganggaran belanja subsidi.
8. Penambahan substansi penggunaan BTT untuk mendanai kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan APBD.
9. Penyediaan alokasi anggaran JKK dan JKM bagi ASN (PPPK).
10. Penyesuaian dasar hukum terkait penyelenggaraan belanja hibah dan bantuan sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018).
11. Dukungan pendanaan Pilkada Tahun 2020.
12. Pengaturan formulasi penghitungan dan proporsi dari alokasi fungsi Pendidikan.
13. Pengaturan formulasi penghitungan dan proporsi dari alokasi anggaran kesehatan.
14. Pengaturan formulasi penghitungan belanja infrastruktur sesuai amanat Undang-Undang mengenai APBN.
15. Pengaturan bahwa dana transfer yang bersifat dinamis yaitu DAU dan Dana Otonomi Khusus.